

**PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA  
PASCA-KONFLIK TAHUN 1999 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KETAHANAN WILAYAH  
(STUDI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU)**

*John E. de Fretes*  
Akademi Militer  
Email: etesj@yahoo.com

**ABSTRACT**

*This paper explained the dynamic of interreligious harmony establishment post 1999 conflict and its implication on below par regional resilience in Ambon. The qualitative data showed four obstacle factors of interreligious harmony, namely blasphemy, narrow primordial, religious deviation activity, and population dense which obstructed the interreligious establishment of pella-gandong. The Concept application of “agree in disagreement” and establishment of the four pillars were embodied in: (1) interreligious harmony legislation’s socialization; (2) community’s solidarity; (3) religious and government leaders’ exemplary, and (4) interreligious dialogue pillar. These would be implied on strong regional resilience in Ambon.*

**Keywords:** *Harmony, Interreligious, Conflict, and Regional Resilience.*

**ABSTRAK**

Tulisan ini menjelaskan seputar dinamika pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama pasca konflik tahun 1999 dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah yang belum berjalan dengan baik di Ambon. Dengan menggunakan data kualitatif, diitemukan bahwa terdapat empat faktor penghambat kerukunan beragama di Ambon, yaitu penodaan agama, primordialisme sempit, kegiatan aliran sempalan, dan kepadatan penduduk yang menghambat kerukunan dalam bentuk pella-gandong. Dengan mengaplikasikan konsep “agree in disagreement” (setuju dalam perbedaan) serta pembinaan dalam empat pilar, yaitu (1) sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerukunan hidup antarumat beragama; (2) solidaritas kemasyarakatan; (3) keteladanan pemimpin agama dan pemerintah, dan (4) pilar dialog antarumat beragama, ini akan berimplikasi terhadap ketahanan wilayah yang kuat di Ambon.

**Kata Kunci:** *Kerukunan Hidup, Antar Umat Beragama, Konflik, dan Ketahanan Wilayah.*

**PENGANTAR**

Adanya pergeseran paradigma pemahaman tentang agama dari idealitas ke historitas, dari doktrin ke entitas sosiologis dan dari diskursus esensi ke arah eksistensi menyebabkan terciptanya sentimen agama sebagai pemicu konflik Ambon Maluku tahun

1999. Terbentuknya pasukan laskar jihat dan RMS. Sebagai aliran radikal telah merusak sendi-sendi kerukunan beragama berbasis kearifan lokal “pella-gandong”.

Berbagai penyebab konflik di Ambon menurut Wirawan dalam bukunya Konflik dan Manajemen Konflik Teori. Aplikasi

dan Penelitian bahwa konflik itu bersifat multidimensi. Konflik itu meliputi konflik politik. Konflik sosial konflik ekonomi. Konflik agama, dan konflik budaya (Wirawan, 2010: 92).

Klimaks dari konflik di Amon Maluku bermuara pada konflik yang bernuansa agama. Wirawan juga menyebutkan bahwa penduduk asli Ambon adalah pemeluk agama yang taat dan hidup rukun melalui toleransi keagamaan yang tinggi. Tiga agama utama yang dianut menurut Wirawan, yaitu Kristen Protestan 49%. Islam 44% dan Katolik 6% dan lainnya adalah Budha dan Konghucu. Konflik yang terjadi menggunakan sentimen agama sebagai pemicunya (Wirawan, 2010:93).

## **PEMBAHASAN**

### **Masuknya Agama Islam Dan Penyebarannya**

Kerajaan-kerajaan di Maluku Utara sebagai kekuatan social baru yang pertama kali didatangi para pedagang China di abad 14. Pergerakan kekuasaan kemudian mulai menuju ke Ambon Lease (Maluku Tengah) melalui Desa Hitu yang terletak di jazirah Lebih itu bagian utara Pulau Ambon yang menjadi basis agama Islam. Hitu menjadi sentral perdagangan cengkeh dan pala terutama terkait dengan pemusatan produksi di Tidore, Ternate, dan Banda. Hal tersebut ditegaskan oleh Wattimanella bahwa Hitu menjadi tempat persinggahan bagi kapal-kapal para pedagang untuk mengambil air tawar (Wattimanella, 2003:44-45).

Penyebaran agama Islam di Maluku Tengah terjadi melalui jalur perdagangan yang menyusuri pesisir utara pulau Ambon. Agama Islam tersebar dari Jazirah Hunimua (berada di Ujung utara pulau Ambon) sampai Lebih

itu, merentang dari Waiya sampai Wakasihi. Daerah-daerah ini telah terjadi asimilasi penduduk yang datang sebagai pedagang dan juga sebagai penyiar agama Islam. Dengan asimilasi tersebut hampir seluruh jazirah ini merupakan daerah-daerah yang pertama kali menganut agama Islam.

### **Masuknya Agama Kristen Dan Penyebarannya**

Masuknya agama Kristen di Maluku bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku dihadapkan dengan realitas bahwa tempat di daerah Tidore, Ternate, Hitu, Huamual, Kelang, Manipa, Buano, dan desa-desa di jazirah Lebih telah menganut agama Islam.

Kedatangan bangsa Portugis di Maluku kemudian menetap di Ternate. Di sana, mereka diminta untuk mendirikan benteng dalam rangka memperkuat kekuasaan kesultanan. Jalur perdagangan dan penyebaran agama Kristen yang strategis diwaktu itu adalah Malaka, Hitu dan Ternate, Hitu menjadi pangkalan untuk menghubungkan Banda sebagai penghasil pala dengan ternate sebagai penghasil cengkeh (Latin: *Eugenia aromatica*) (Wattimanella, 2003).

### **Kerukunan Hidup Antar-Umat Beragama (KHAUB)**

Tuhan dalam kreasinya telah menetapkan kepada semua ciptaan-Nya, secara khusus kepada manusia memiliki hakikat hidup yang berkelompok sebagai makhluk sosial. Effendi mengatakan bahwa pengelompokan tersebut dapat dikategorikan berdasarkan keturunan atau genealogis atau secara teritorial atau karena kedua-duanya genealogis-teritorial atau teritorial-genealogis (Effendi, 1987:25).

Wawancara dengan tokoh kunci Kepala Latupati Maluku (Kepala Raja-Raja Maluku) Bonifaxius Silooy pada tanggal 23 Mei 2012 mengatakan bahwa Maluku adalah negeri raja-raja yang telah ada sejak abad ke-13 sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Negeri atau desa dulunya disebut sebagai “aman” atau “hena”, yang merupakan kumpulan dari beberapa mata rumah, yang digabungkan dalam “rumahtau-rumahtau”. Rumahtau ini mempunyai hubungan genealogis-teritorial yang tergabung dalam satu soa (wilayah), dan tiap-tiap soa dipimpin oleh seorang kepala soa dan yang soanya berdekatan dengan membentuk sebuah kelompok yang disebut “aman” atau “hena”. Dari sini terbentuklah kerajaan negeri/desa yang patrimonial. Negeri-negeri adat ini tersebar cukup banyak di seluruh Maluku, kurang lebih 387 negeri adat.

Jadi sesungguhnya, kehidupan masyarakat Maluku pada umumnya dan masyarakat Ambon pada khususnya, telah ada sebuah hubungan kekerabatan oleh adanya hubungan genealogis. Prinsip kerukunan telah terbangun saat Islam dan Kristen masuk di Ambon Maluku, sehingga berabad-abad yang silam sebelum terjadinya pertikaian ditahun 1999, masyarakat Ambon hidup dalam keadaan rukun aman dan damai. Kerukunan itu tercipta oleh adanya pranata sosial yang merekatkan kehidupan orang basudara “salam-sarane” (Islam dan Kristen).

Pelaksanaan kerukunan hidup antar-umat beragama mengambil bentuk *pellagandong*. Dalam dialek Ambon dikenal istilah “orang basudara” (bersaudara) yang merupakan sebuah realitas sosiokultural yang telah berakar dalam karakter hidup anak-anak

negeri Maluku. Orang basudara adalah sapaan khas untuk menyapa sesama anak-anak negeri Maluku yang mengandung nilai genealogis (sedarah=gandong), yaitu asal usul nenek moyang yang sekandung. Inilah sebuah sapaan anak-anak negeri Maluku dalam suasana keakraban hidup dengan berbagai aturan proses kehidupan yang terstruktur dan teratur.

Wawancara dengan Raja Amahusu informan kunci yang juga sebagai Kepala Latupati (Kepala Raja-raja) Maluku Bonifaxius Silooy mengatakan bahwa: dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 telah mengubah status negeri-negeri adat menjadi desa sehingga berakibat semua pranata adat di dalamnya juga berubah. Perubahan itu adalah Saniri Negeri menjadi LMD dan LKMD dan Soa menjadi RT/ RW. Kondisi ini menyebabkan tatanan adat istiadat di Maluku dapat dikatakan punah. Akan tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah Maluku Nomor 14 tahun 2005. SK Walikota Ambon Nomor 207 Tahun 2003. Peraturan Walikota Ambon Nomor 424 Tahun 2004 dan Peraturan daerah kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang penetapan kembali “negeri” sebagai kesatuan masyarakat adat dalam wilayah Provinsi Maluku, maka negeri-negeri adat dapat dihidupkan kembali dengan perangkat-perangkat pemerintahan adatnya (Wawancara Tokoh Adat/Latupati Maluku, 21 Mei 2012).

Dahaklory mengutip pandangan Ajawila dalam tesisnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Kerukunan Hidup Keberagaman Orang Basudara di Ambon Maluku, menyatakan bahwa ciri-ciri hubungan orang

basudara (*pella-gandong*) sebagai berikut: (1) Saling menolong dalam berbagai aktivitas; (2) Saling mendukung untuk mencapai sesuatu yang dimanfaatkan secara bersama; (3) Mengambil keputusan dengan cara musyawarah (Dahaklory, 2006: 50).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal mencerminkan sebuah nilai yang menyampaikan gagasan dan ide terhadap hubungan-hubungan sosial. Kearifan lokal mendorong agar masyarakat dapat hidup bersahaja dengan siapa saja tanpa ada simbol-simbol sosial dan agama. Kearifan Lokal dalam bentuk *pella-gandong* mengembangkan prinsip kolektivisme dalam hubungan-hubungan sosial yang dapat membangun perdamaian dan juga sebagai sarana penyelesaian pertikaian di Ambon.

Wawancara dengan key informan Pdt. Christian Izaac Tamaela juga menyampaikan hal yang sama. Sebagai penduduk asli yang tinggal di daerah Kudamati Ambon yang mayoritas beragama Kristen menyatakan bahwa kebersamaan dalam ikatan tali persaudaraan yang dibangun di Ambon adalah anugerah Tuhan yang begitu indah karena tidak ada sekat apapun yang merintang persaudaraan tersebut sehingga jika kerusakan yang terjadi mulai dari tahun 1999 sampai saat ini masih ada gejolak, itu bukan dari masyarakat Maluku, tetapi ada provokator dan penyusupan dari luar yang tidak menginginkan Ambon hidup dalam kedamaian dan cinta kasih (Wawancara Tokoh Agama Kristen. 25 Mei 2012).

Oleh karena itu, jelaslah bahwa persaudaraan yang dibangun di dalam kearifan lokal itu menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat yang plural. Persaudaraan menghendaki adanya ketulusan hati semua

pihak untuk mengendalikan kebebasannya masing-masing, sehingga tidak mengganggu kebebasan orang lain. Ketulusan hati dimaksud harus tumbuh dan mekar secara autentik dari dalam diri individu melalui penghayatan iman dan melalui dinamika perjumpaan serta hidup bersama antar umat beragama yang berbeda.

Melalui pengalaman perjumpaan seperti itu, diharapkan lahir konsensus-konsensus minimum bersama yang mengatur kehidupan yang bebas dan rukun. Konsensus minimum dimaksud adalah hal-hal yang minimal dapat disepakati secara tulus oleh semua pihak melalui percakapan, komunikasi, interaksi, dan kerjasama antar-kelompok agama.

#### **Kendala Pembinaan KHAUB**

Berdasarkan fakta penelitian di Ambon, ditemukan lima kendala utama yang menghambat kerukunan hidup antarumat beragama, Lima penghambat tersebut: (1) Adanya penodaan agama oleh oknum-oknum tertentu yang menggunakan sentiment agama sebagai pemicu konflik seperti lascar jihat dan RMS; (2) Adanya primordialisme sempit. Primordialisme sempit dipengaruhi oleh tradisi dan budaya masyarakat Ambon yang lekat dengan miras dan ketidaksadaran bertransmigrasi. Kondisi tersebut menyebabkan sering tercipta konflik perbatasan tanah dan konflik social lainnya di Ambon; dan (3) Kegiatan aliran sempalan. Masuknya kegiatan aliran sempalan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, menyebabkan konflik yang menghancurkan kerukunan di Ambon; (4) Kepadatan penduduk. Adanya kepadatan penduduk akibat segregasi yang terjadi di antara kedua komunitas yang berkonflik. Penduduk yang tadinya hidup berasimilasi antarasatu dengan lain kini

terkungkung dalam suatu wilayah yang sempit. akibatnya menghambat kerukunan yang berbasis *pella-gandong*. Penyebab utamanya adalah kepadatan penduduk didominasi oleh pendatang yang asing terhadap *local wisdom* di Ambon Maluku; (5) Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum oleh pemerintah juga menjadi penghambat kerukunan hidup antar umat beragama di Ambon Maluku.

### **Pembinaan KHAUB Dan Ketahanan Wilayah**

Pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama pasca-konflik tahun 1999 telah dilakukan empat pendekatan pengelolaan konflik oleh pemerintah, yaitu pencegahan, pengelolaan, resolusi serta transformasi konflik (Sukidi, 2001; Wirawan, 2010). Pendekatan *pertama*, pencegahan, direalisasikan melalui: (1) Membangun pilar solidaritas kemasyarakatan. Masyarakat yang majemuk dibangun dalam pranata social *pella-gandong* yang bersinergi dengan nilai-nilai agama, baik yang dianut Kristen, Islam maupun Hindu dan Budha; (2) Membangun pilar keteladanan baik dari para tokoh agama, pemerintah, dan semua unsur *stakeholder* melalui perbuatan yang selaras dengan ucapan, demi menyadarkan umat yang berkonflik. Pendekatan *kedua*. Pengelolaan direalisasikan melalui: (1) Membangun pilar dialog konstruktif dan inklusif yang bernuansa "peace and trust building" di semua lembaga agama. Lembaga agama baik Kristen (Sinode-GPM), keuskupan Amboina, Islam (MUI), juga Hindu dan Budha secara integratif saling menopang satu dengan lainnya. Pemerintah bersama FKUB dan juga lembaga-lembaga pendidikan di Ambon Maluku menjadi lembaga yang netral demi menetralsir

gejala-gejala yang membahayakan kerukunan antarumat beragama dalam konsep *agree in disagreement*. Pembinaan tersebut direalisasi dalam pranata *pella-gandong* yaitu pada aspek *genealogis*. Adanya sinergi antara nilai-nilai *local wisdom* dan pengajaran agama, niscaya akan melahirkan kerukunan hidup beragama yang handal di Ambon Maluku.

Pendekatan *ketiga*, resolusi konflik yaitu dengan direalisasikan pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama pasca-konflik tahun 1999 di Ambon Maluku: (1) Proaktif mengantisipasi adanya penodaan agama oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya sentimen agama yang dipakai oleh aliran radikalisme dapat memicu kembali konflik Ambon Maluku. (2) Secara jeli melihat pemicu konflik sampai ke akar rumput (*grassroots*) salah satunya adalah masalah primordialisme sempit. Sampai saat ini primordialisme sempit menjadi ancaman terbesar dan berpotensi menghancurkan kerukunan berbasis *pella-gandong* dan berbasis nilai-nilai kesucian agama. (3) Mewaspadaikan kegiatan aliran sempalan Baik dari Islam maupun Kristen yang selama ini berkonflik. Masuknya laskar jihat dan terbentuknya RMS terkait dengan berbagai aliran sempalan yang membahayakan kerukunan hidup beragama di Ambon Maluku melalui doktrin-doktrin yang sangat radikal.

Pendekatan keempat, transformasi konflik direalisasikan dengan: (1) Menata kembali setiap daerah konflik yang telah mengalami *segregasi*. Adanya kepadatan penduduk yang didominasi oleh komunitas satu iman baik Kristen maupun Islam, menyebabkan terkungkungnya dinamika interaksi sosial yang bersifat *genealogis* tersendat. (2) Pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama pasca

konflik tahun 1999, hendaknya disikapi oleh pemerintah secara arif. Lemah pengawasan dan penegakkan hukum oleh pemerintah menyebabkan semua solusi perdamaian menjadi hambar. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas, transparan, adil, dan jujur dalam menindak semua ancaman kerukunan hidup beragama di Ambon Maluku. (3) Pembinaan hendaknya mampu membongkar struktur dan pola berpikir parsial, eksklusif, dan sikap fanatisme buta dan sempit terhadap eksistensi agama orang lain melalui *peace sermon* (khotbah damai). Jika tidak, dapat menimbulkan kerawanan dan berimplikasi terhadap ketahanan wilayah dalam bidang ideologi, ekonomi, pendidikan, dan Hankam.

Pengelolaan konflik secara progressif dan intensif di Ambon Maluku berdampak positif terhadap ketahanan wilayah di Ambon Maluku, Implikasi tersebut berdampak pada (1) implementasi ideologi secara baik dan benar dalam interaksi sosial; (2) terhadap ekonomi, melalui peningkatan sumber daya umat lewat pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi; (3) terhadap pendidikan, melalui pembangunan sarana pendidikan dan, (4) terhadap hankam, dengan penantaan pembinaan umat melalui ajaran yang suci dan benar melalui program tersebut diharapkan ke depan ketahanan wilayah (Tanwil) yang kokoh akan terwujud di dalam kehidupan masyarakat Ambon Maluku (Sunardi, 1997).

## **SIMPULAN**

Masyarakat Ambon Maluku telah tercipta sebagai sebuah daerah di Indonesia dengan corak masyarakat yang plural (*pluralistic society*). Pluralitas masyarakat Ambon ditandai dengan ciri yang bersifat horizontal

dan vertikal. Ciri horizontal terlihat pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, agama, adat, dan sifat-sifat kedaerahan dalam bentuk kearifan lokal (*pella-gandong*). Ciri vertikal masyarakat Ambon adalah diubahkannya kepercayaan *Samanisme* ke bentuk agama *Abrahamik* dalam aspek *genealogis*.

Saat ini, kemajemukan berkembang cepat seiring dengan pembangunan Ambon. Ambon yang tadinya homogeny, tiba-tiba berkembang menjadi heterogen. Hal ini kurang diimbangi dengan kelancaran komunikasi antara sesama kelompok masyarakat, bahkan sebagian kelompok masyarakat menjadi asing bagi masyarakat lainnya, meskipun tinggal di wilayah yang sama. Akibatnya muncul dan berkembang rasa saling curiga.

Keadaan seperti ini akan semakin sulit jika jembatan komunikasi di antara pemuka agama dan tokoh masyarakat kurang atau tidak tersedia. Kegagalan berkomunikasi dan ketidakmampuan mengelola perbedaan dengan baik, mengakibatkan krisis yang semestinya dapat diredam, justru berkembang menjadi lebih besar dan sulit untuk ditanggulangi. Melalui komunikasi aktif dari pemerintah dan semua unsur *stakeholder* dalam mesosialisasikan peraturan perundang-undangan sampai ke akar rumput (*grassroots*) diharapkan menjadi jembatan emas menuju kerukunan abadi.

Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama pasca konflik tahun juga direalisasikan melalui sikap solidaritas kemasyarakatan yang majemuk dalam pranata sosial *pella-gandong* yang bersinergi dengan nilai-nilai agama baik yang dianut Kristen, Islam maupun Hindu dan Budha.

Demikian pula dengan membangun aspek keteladanan baik dari para tokoh agama, pemerintah, dan semua unsur *stakeholder*. Jika tindakan dan perbuatan selaras dengan ucapan, akan melahirkan sebuah keteladanan yang berdayaguna menyadarkan umat yang berkonflik. Pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama pasca-konflik tahun 1999, juga telah membangun dialog konstruktif dan inklusif yang bernuansa "peace and trust building" di Semua lembaga agama, Lembaga agama baik Kristen (Sinode GPM), Keuskupan Amboina, Islam (MUI), Juga Hindu, dan Budha secara integratif saling menopang satu dengan lainnya. Pemerintah dan FKUB dan juga lembaga-lembaga pendidikan di Ambon Maluku telah menjadi lembaga yang netral demi menetralsir gejala-gejala yang membahayakan kerukunan antarumat beragama dalam konsep *agree in disagreement* dan tidak boleh mengorbankan keyakinan dan keimanan orang lain. Pembinaan tersebut direalisasikan dalam pranata *pella-gandong*, yaitu pada aspek *genealogis*. Adanya sinergi antara nilai-nilai *local wisdom* dan pengajaran agama, niscaya akan melahirkan kerukunan hidup beragama yang handal dan berimplikasi kuat terhadap ketahanan wilayah di Ambon Maluku. Implikasi tersebut berdampak sebagai berikut: ( 1) implementasi ideologi secara baik dan benar dalam interaksi sosial; (2) Terhadap ekonomi, melalui peningkatan sumber daya umat lewat pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi; (3) terhadap pendidikan,

melalui pembangunan sarana pendidikan dan; (4) terhadap hankam, penantaan pembinaan umat melalui ajaran yang suci dan benar melalui program tersebut diharapkan ke depan ketahanan wilayah (Tanwil) yang kokoh akan terwujud di dalam kehidupan masyarakat Ambon Maluku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dahoklory, Nikodemus. 2006. Implementasi Kebijakan Pembinaan Kerukunan Hidup Keberagamaan Orang Basudara di Ambon Maluku. *Tesis: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Effendi, Ziwari. 1987. *Hukum Adat Ambon Lease*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sukidi. 2001. *Teologi Inklusif Cak Nur*. PT.Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sunardi, RM. 1997, *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: Hatanas.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wattimanella, Daniela. 2003 Perjumpaan Islam dan Kristen dan Kristen di Maluku Tengah. Suatu Pendekatan Sosiologis Historis. *Tesis: Program Pascasarjana Sosiologis Agama UKSW Salatiga*.

#### Wawancara dengan:

1. Bonifaxius Silooy, tanggal 21-5-2012
2. Pdt Christian Izaak Tomaela, tanggal 25-5-2012